

**ANALISIS PENGARUH UPAH
TERHADAP POLA KONSUMSI KARYAWAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

OLEH :

SRI WAHYUNI
NIM : 09C20101055



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2014**

ABSTRAK

Sri Wahyuni. Analisis Pengaruh Upah terhadap Pola Konsumsi Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya dibawah bimbingan Yayuk. EW dan Mujal Hendra.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upah terhadap pola Konsumsi Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari data kuisisioner dan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nagan Raya. Untuk analisis data menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 20. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana, koefisien korelasi dan determinasi dan uji hipotesis yang digunakan uji t statistik.

Pembuktian dilakukan dengan menggunakan uji t statistik yang menunjukkan bahwa variabel Upah berpengaruh terhadap Pola Konsumsi Karyawan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (5,139 > 1,980).

Hasil Koefisien korelasi variabel Upah diperoleh $R = 0,550$ secara positif menjelaskan terdapat hubungan yang positif terhadap pola Konsumsi Karyawan Karyawan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya dengan keeratan hubungan sebesar 55,0 persen.

Hasil pengujian koefisiensi determinasi menunjukkan bahwa variabel Upah U terhadap pola Konsumsi Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya memberi sumbangan sebesar 30,2%. Sedangkan sisanya sebesar 69,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model regresi.

Kata Kunci : *Upah dan pola Konsumsi Karyawan.*

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH UPAH TERHADAP POLA
KONSUMSI KARYAWAN PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DI KABUPATEN NAGAN RAYA
Nama Mahasiswa : SRI WAHYUNI
NIM : 09C20101055
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN (EKP)

Menyetujui,

Komisi Pembimbing

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Yayuk EW, SE. M.Si

Mujal Hendra, SE, M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

**Ketua Program Studi Ekonomi
Pembangunan**

Zulbaidi MM

Yayuk EW, SE. M.Si

RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Sri Wahyuni
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : , 29 januari 1991
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat : Dusun Persiapan, Gampong Paya Peunaga
Kec.Meureubo, Kab. Aceh Barat.
Alamat Email : Sri_wahyunisri57@ymail.com.

Pendidikan Formal :

- SD N 1 Damartutong Kecamatan Samadua, Aceh Selatan (Lulus Tahun 2003).
- SMP N 2 Samadua, Aceh Selatan (Lulus Tahun 2006).
- SMA N 2 Tapak Tuan, Aceh Selatan (Lulus Tahun 2009).

B. DATA ORANG TUA

Nama ayah : Amiruddin
Nama Ibu : Nurhayati
Alamat : Gampong Kuta Blang Samadua.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan anugerah yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memperjuangkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Skripsi yang berjudul “*Analisis Pengaruh Upah terhadap Pola Konsumsi Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya*” ini ditulis sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, nasihat dan kerjasama dari berbagai pihak. Terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang tidak dapat penulis ungkapkan segala jasa-jasa yang telah diberikannya. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Yayuk EW, SE. M.Si selaku Dosen Pembimbing Pertama serta selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan atas bantuannya yang telah memberikan saran dan nasihat sehingga semuanya terasa mudah dan lancar.
2. Bapak Mujal Hendra, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak Zulbaidi, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

4. Teman-teman seangkatan yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu memberikan masukan-masukan.
5. Semua pihak yang telah mendoakan, menemani dan mendukung penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.

Demikian ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada semua orang yang telah menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki ketidaksempurnaan. Walaupun demikian, semoga tetap bermanfaat bagi semua pihak.

Meulaboh, 23 september 2014

Penulis

Sri Wahyuni

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Sistematika Pembahasan	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Upah	9
2.1.1. Pengertian Upah	9
2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah.....	10
2.1.3. Upah Minimum	12
2.2. Konsumsi.....	18
2.2.1. Pengertian Konsumsi dan Fungsi Konsumsi.....	18
2.2.2. Pola Konsumsi.....	19
2.2.3. Pendapatan Mempengaruhi Konsumsi	20
2.2.4. Teori Konsumsi John Maynard Keynes	21
2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Masyarakat	22
2.3.1. Hubungan Pendapatan dengan Konsumsi	23
2.3.2. Hubungan Jumlah Tanggungan dengan Konsumsi	24
2.3.3. Hubungan Pendidikan dengan Konsumsi.....	24
2.3.4. Hubungan Penggunaan Kredit dengan Konsumsi.....	25
2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis	25
2.5. Perumusan Hipotesis	26

III. METODE PENELITIAN	
3.1. Populasi dan Sampel	27
3.2. Data Penelitian	28
3.2.1. Jenis dan Sumber Data	28
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data	28
3.3. Model Analisis Data.....	28
3.4. Definisi Operasional Variabel.....	29
3.5. Pengujian Hipotesis.....	29
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	31
4.1.1 Perkembangan Upah Karyawan Perkebunan Kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya	32
4.1.2 Tingkat Konsumsi Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya.....	33
4.2 Hasil Pengujian Hipotesis	34
4.2.1 Analisis Regresi Linear Sederhana	35
4.2.2 Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi.....	36
4.2.3 Uji t.....	37
V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	39
5.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN –LAMPIRAN	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Penentuan Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Upah: Pendekatan Pasar Bebas	10
2. Respon Konsumen terhadap Perubahan Pendapatan.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2004 sampai dengan 2014.....	3
2. Persentase Pengeluaran Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Golongan per Kapita Sebulan.....	5
3. Populasi dan Sampel Karyawan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit.....	27
4. Tingkat Upah Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2014	32
5. Tingkat Konsumsi Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014	33
6. Descriptive Statistics	34
7. Hasil Estimasi Pengaruh Upah terhadap Pola Konsumsi.....	35
8. Hasil Koefisien Kolerasi dan Koefisien Determinasi	36
9. Uji t	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Input Jumlah Upah dan Jumlah Konsumsi Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya.....	43
2. Hasil Regresi Jumlah Upah dan Jumlah Konsumsi Karyawan PerkebunanKelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya.....	49
2. Daftar Tabel Uji t.....	53
3. Kuisisioner.....	54

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tataran global, ”*Deklarasi Millennium*” yang ditandatangani di New York tahun 2000 juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu berisi komitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. Komitmen tersebut diterjemahkan menjadi beberapa tujuan dan target yang dikenal sebagai *Millennium Development Goals/MDGs* (Bappenas, 2007, h. 7).

Salah satu alat ukur dalam pembangunan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan, oleh karena itu jumlah penduduk di dalam suatu negara adalah unsur utama dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan bahkan dapat menjadi beban bagi keberlangsungan pembangunan tersebut. Jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan.

Penduduk yang memasuki usia kerja dan yang memerlukan pekerjaan di Indonesia jumlahnya terus meningkat, sedangkan pertumbuhan lapangan kerja menunjukkan perkembangan yang relatif kecil. Ketidakseimbangan ini menyebabkan terjadinya tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Ditambah lagi kondisi perekonomian negara yang mengalami krisis moneter yang berkepanjangan, memberi dampak yang besar terhadap banyak bidang kehidupan rumah tangga dalam masyarakat (BPS, 2013).

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan patokan utama sumber pendapatan tenaga kerja sehingga menjadi alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja.

Upah minimum suatu daerah berpengaruh terhadap pendapatan sehingga berpengaruh pula terhadap pola konsumsi rumah tangga dalam masyarakat. Semakin tinggi pendapatan maka pola konsumsi baik pangan maupun non pangan akan semakin bervariasi. Konsumsi pangan rumah tangga dipengaruhi oleh harga bahan pangan, sedangkan konsumsi non pangan rumah tangga dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga dan pendidikan. Selain itu faktor tingkat suku bunga juga mempengaruhi konsumsi non pangan rumah tangga di Indonesia.

Provinsi Aceh salah satu provinsi di negara Indonesia yang terus menerus mengalami perkembangan tingkat upah minimum. Kabupaten Nagan Raya yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang terbentuk pada tahun 2002 hingga kini mengikuti perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 10 tahun terakhir dari tahun 2004 sampai tahun 2014 seperti ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh
tahun 2004 - 2014

No	Tahun	Upah Minimum Rata-Rata (Rupiah)
1	2004	550.000
2	2005	620.000
3	2006	820.000
4	2007	850.000
5	2008	1.000.000
6	2009	1.200.000
7	2010	1.300.000
8	2011	1.350.000
9	2012	1.400.000
10	2013	1.550.000
11	2014	1.750.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (Maret 2014).

Krisis global pada tahun 2008 hingga tahun 2009 mengakibatkan perekonomian lesu sehingga perusahaan tidak berani menaikkan upah terlalu tinggi. Baru pada tahun 2010, upah minimum mengalami kenaikan paling tinggi setelah krisis global berlangsung dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 tersebut.

Sektor pertanian merupakan sektor yang padat karya. Pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Aceh tidak terlepas dari peran tenaga kerja di sektor tersebut. Masyarakat yang bekerja disektor pertanian, ada yang bekerja dilahan sendiri, dan banyak juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini. Sebagian besar masyarakat di Provinsi Aceh khususnya yang berada di pedesaan menggantungkan pekerjaannya pada sektor pertanian dan perkebunan.

Daerah Aceh merupakan salah satu provinsi yang penyerapan tenaga kerjanya terbesar di sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu sub sektor perkebunan yang terbanyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Aceh pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Nagan Raya adalah sub sektor perkebunan sawit. Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang memiliki lahan perkebunan sawit yang luas di Provinsi Aceh.

Kabupaten Nagan Raya ibukotanya adalah Suka Makmue yang berjarak sekitar 287 km dari kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh. Kabupaten ini berdiri berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002 (tanggal 2 Juli 2002) sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (2013) mencatat sub sektor perkebunan menjadi salah satu produk unggulan/andalan Kabupaten Nagan Raya yaitu komoditi kelapa sawit, karet, kopi, kakao, buah naga dan nilam. Khusus untuk komoditas kelapa sawit, di Kabupaten Nagan Raya terdapat 17 buah perusahaan yang menanamkan modalnya baik PMDN ataupun PMA dengan luas areal mencapai 72.420 Ha dengan produksi mencapai 280.164 Ton/Tahun Tandan Buah Segar (TBS). Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terdapat di Nagan Raya sejumlah 5 (lima) unit dengan produksi CPO mencapai 34.926 Ton/Tahun (Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2013).

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah melalui struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan yang tinggi tergolong rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah dibandingkan dengan rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan yang rendah (Handewi dkk, 2004, h. 32).

Secara umum kebutuhan konsumsi/pengeluaran rumah tangga berupa kebutuhan pangan dan kebutuhan non pangan dimana kebutuhan keduanya berbeda. Pada kondisi pendapatan yang terbatas, lebih dahulu mementingkan kebutuhan konsumsi pangan. Hal ini sesuai dengan hukum engel yang mengemukakan bahwa kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah akan menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan makanan terlebih dahulu. Seiring dengan pergeseran dan peningkatan pendapatan, proporsi pola pengeluaran untuk makan akan menurun dan pengeluaran untuk kebutuhan non pangan akan meningkat. Dengan kondisi tersebut akan terukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan atau keduanya (Sugiarto, 2008, h. 15).

Jumlah pengeluaran/konsumsi perkapita penduduk Kabupaten Nagan Raya ditunjukkan pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2.
Persentase Pengeluaran Penduduk Kabupaten Nagan Raya menurut golongan per kapita sebulan

No	Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Kurang dari 100 000	0,36	0,25	-
2	100 000 - 149 000	1,12	0,94	0,18
3	150 000 - 199 999	6,12	4,70	2,33
4	200 000 - 299 999	25,93	21,85	17,53
5	300 000 - 499 999	41,40	38,58	40,91
6	500 000 - 749 999	18,56	20,58	21,94
7	750 000 - 999 999	4,04	6,74	8,60
8	1 000 000 dan Lebih	2,49	6,36	8,50
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya, 2011 dan Triwulan 2012

Tabel 2 tersebut terlihat bahwa pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Nagan Raya terhadap konsumsi makanan lebih besar dari pangsa

konsumsi non makanan. Jumlah ini melampaui kriteria miskin yang dikemukakan oleh BPS (2013) yaitu rata-rata konsumsi Rp 15.000,00 sampai Rp. 20.000,00 per hari atau Rp 500.000,00 sebulan. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa konsumsi penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011. Ketika pendapatan meningkat lebih dari Rp 500.000,00 sebulan maka pola konsumsi penduduk sudah mulai berubah. Ketika pendapatan rumah tangga meningkat, penduduk Kabupaten Nagan Raya memiliki pangsa konsumsi non makanan lebih besar dari pangsa konsumsi makanan.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa dengan upah minimum di Kabupaten Nagan Raya tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.750.000,00, maka konsumsi masyarakat khususnya karyawan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya yang mengikuti ketentuan upah minimum tersebut mencukupi baik untuk kebutuhan konsumsi makanan maupun non makanan.

Kondisi ini selanjutnya menimbulkan minat penulis untuk melakukan studi mengenai “*Analisis Pengaruh Upah terhadap Pola Konsumsi Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Upah terhadap pola konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Upah terhadap pola konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian Analisis Pengaruh Upah Terhadap Pola Konsumsi karyawan Perkebunan Kepala Sawit di Kabupaten Nagan Raya ini mencakup manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

a. Bagi penulis

Manfaat bagi penulis adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang Pengaruh Upah terhadap pola konsumsi karyawan khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

b. Bagi lingkungan akademik.

Manfaat bagi lingkungan akademik adalah sebagai bahan studi ilmiah dan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya untuk mengetahui pengaruh Upah terhadap pola konsumsi karyawan khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi pihak luar untuk dapat dijadikan sebagai informasi atau bahan masukan baik bagi pemerintah maupun pihak terkait lainnya mengenai pola konsumsi rumah tangga karyawan pada sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang digunakan dalam menyusun penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bagian Satu Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian Kedua Tinjauan Pustaka yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran yang memberikan gambaran alur penelitian ini serta perumusan hipotesis.

Bagian Ketiga Metode Penelitian yang menguraikan beberapa variabel yang digunakan, definisi operasional variabel, penentuan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta metode analisis dalam penelitian.

Bagian Keempat Hasil dan Pembahasan yang memaparkan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian ini serta pembahasan mengenai hasil yang dipaparkan tersebut.

Bagian Kelima Kesimpulan dan Saran yang menyimpulkan kembali seluruh hal yang telah dipaparkan dalam penelitian ini serta saran-saran yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Upah

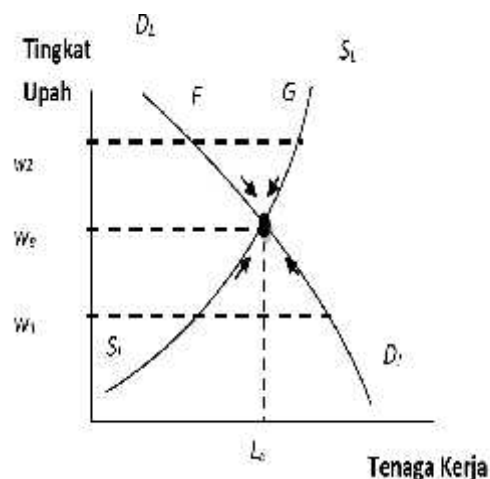
2.1.1. Pengertian Upah.

Mankiw (2003, h. 5) menyatakan bahwa upah tidak terlepas dari hubungannya dengan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja, sama halnya dengan pasar-pasar lainnya dalam perekonomian diatur oleh kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan menentukan tingkat upah. Upah merupakan salah satu rangsangan penting bagi para karyawan dalam suatu perusahaan. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah yang merupakan pendorong utama, tingkat upah hanya merupakan dorongan utama hingga pada tarif dimana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup para karyawan sepantasnya.

Besarnya tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat. Tingkat upah alami naik proporsional dengan standar hidup masyarakat. Sama halnya dengan harga-harga lainnya, harga tenaga kerja (upah) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, maka dalam kondisi ekuilibrium, secara teoritis para pekerja akan menerima upah yang sama besarnya dengan nilai kontribusi mereka dalam produksi barang dan jasa.

Tingkat permintaan tenaga kerja dapat mempengaruhi nilai upah dari tenaga kerja itu sendiri. Upah sebenarnya merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah.

Gambar 1 berikut memperlihatkan bagaimana tingkat permintaan tenaga kerja yang menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah.



Gambar 1. Penentuan Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Upah:
Pendekatan Pasar Bebas, Todaro (2004, h. 9)

Pada gambar terlihat, titik w_e melambangkan tingkat upah ekuilibrium (*equilibrium wage rate*), pada tingkat upah yang lebih tinggi seperti pada w_2 , penawaran tenaga kerja melebihi permintaan sehingga persaingan di antara individu dalam rangka memperebutkan pekerjaan akan mendorong turunnya tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibriumnya, yakni w_e . Sebaliknya pada upah yang lebih rendah seperti w_1 , jumlah total tenaga kerja yang akan diminta oleh produsen akan melebihi kuantitas penawaran yang ada sehingga terjadi persaingan diantara para pengusaha dalam memperebutkan tenaga kerja dan mendorong kenaikan tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibrium, w_e . Kelemahan dari model Pasar Bebas Kompetitif Tradisional adalah kurang memberikan petunjuk yang berarti mengenai kenyataan determinasi upah dan lapangan kerja khususnya di negara berkembang. Mekanisme penyesuaian otomatis dalam pasar tidak akan mampu mendorong tingkat upah riil sampai pada tingkat w_e yang merupakan tingkat upah ekuilibrium.

Pengertian upah menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003, Bab I, Pasal 1, Ayat 30): "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan". Upah juga merupakan penghargaan dari tenaga karyawan atau karyawan yang dimanifestasikan sebagai hasil produksi yang berwujud uang, atau suatu jasa yang dianggap sama dengan itu, tanpa suatu jaminan yang pasti dalam tiap-tiap minggu atau bulan. Gaji sebenarnya juga upah, tetapi sudah pasti banyaknya dan waktunya. Artinya banyaknya upah yang diterima itu sudah pasti jumlahnya pada setiap waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal waktu yang lazim digunakan di Indonesia adalah bulan. Gaji merupakan upah kerja yang dibayar dalam waktu yang ditetapkan. Sebenarnya bukan saja waktu yang ditetapkan, tetapi secara relatif banyaknya upah itu pun sudah pasti jumlahnya. Di Indonesia, gaji biasanya untuk pegawai negeri dan perusahaan-perusahaan besar. Jelasnya di sini bahwa perbedaan pokok antara gaji dan upah yaitu dalam jaminan ketepatan waktu dan kepastian banyaknya upah. Namun keduanya merupakan balas jasa yang diterima oleh para karyawan atau karyawan.

Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi, sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu :

1. Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja;

2. Upah Riil adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut

Berdasarkan penjelesan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa definisi upah adalah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum. Upah dapat diterima pekerja di lingkungan tempat kerja milik negara atau tempat swasta.

2.1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Upah.

Faktor penting yang mempengaruhi besarnya upah yang diterima oleh para karyawan, yaitu :

1. Penawaran dan permintaan karyawan.
2. Organisasi buruh.
3. Kemampuan untuk membayar.
4. Produktivitas.
5. Biaya hidup.
6. Peraturan pemerintah..

Menurut Sumarsono (2009, h. 25) Ada beberapa sistem yang digunakan untuk mendistribusikan upah, dirumuskan empat sistem yang secara umum dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

1. Sistem upah menurut banyaknya produksi.

Upah menurut banyaknya produksi diberikan dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat dan berproduksi lebih banyak. Produksi yang dihasilkan dapat dihargai dengan perhitungan ongkosnya. Upah sebenarnya dapat dicari dengan menggunakan standar normal yang membandingkan

kebutuhan pokok dengan hasil produksi. Secara teoritis sistem upah menurut produksi ini akan diisi oleh tenaga-tenaga yang berbakat dan sebaliknya orang-orang tua akan merasa tidak kerasan.

2. Sistem upah menurut lamanya bekerja

Sistem upah semacam ini akan mendorong untuk lebih setia dan loyal terhadap perusahaan dan lembaga kerja. sistem ini sangat menguntungkan bagi yang lanjut usia dan juga orang-orang muda yang didorong untuk tetap bekerja pada suatu perusahaan. Hal ini disebabkan adanya harapan bila sudah tua akan lebih mendapat perhatian. Jadi upah ini kan memberikan perasaan aman kepada karyawan, disamping itu sistem upah ini kurang bisa memotivasi karyawan.

3. Sistem upah menurut lamanya dinas.

Upah menurut lamanya bekerja disebut pula upah menurut waktu, misalnya bulanan. Sistem ini berdasarkan anggapan bahwa produktivitas kerja itu sama untuk waktu yang kerja yang sama, alasan-alasan yang lain adalah sistem ini menimbulkan ketentraman karena upah sudah dapat dihitung, terlepas dari kelambatan bahan untuk bekerja, kerusakan alat, sakit dan sebagainya.

4. Upah yang diberikan menurut kebutuhan.

Upah yang diberikan menurut besarnya kebutuhan karyawan beserta keluarganya disebut upah menurut kebutuhan. Seandainya semua kebutuhan itu dipenuhi, maka upah itu akan mempersamakan standar hidup semua orang.

2.1.3 Upah Minimum.

Kebijakan upah di Indonesia merujuk pada standar kelayakan hidup bagi para pekerja. Undang Undang Republik Indonesia No. 13/2003 tentang Tenaga Kerja, upah minimum merupakan pendapatan tetap bagi rumah tangga dalam masyarakat sehingga pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Upah minimum yang ditetapkan tersebut berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berupa kebutuhan akan pangan. Dalam Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, upah minimum didefinisikan sebagai ” *Upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap...*”. Sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja, upah yang diberikan dalam bentuk tunai harus ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk pekerja itu sendiri maupun keluarganya.

Upah minimum berpengaruh terhadap pendapatan sehingga mempengaruhi pola konsumsi dalam masyarakat. Sayekti (2008, h. 7) menyatakan perbedaan pendapatan akan mempengaruhi konsumsi dan pola konsumsi rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan maka pola konsumsi baik pangan maupun non pangan akan semakin bervariasi. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Suyastiri (2008, h. 17), konsumsi rumah tangga khususnya pangan dipengaruhi oleh pendapatan, harga bahan pangan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan. Menurut Sangadji (2007, h. 18), faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga di Indonesia adalah pendapatan dan tingkat suku bunga. Dimana

tingkat suku bunga tersebut yang nantinya akan semakin membebani pengeluaran suatu rumah tangga.

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh didalam lingkungan usahanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum (id.wikipedia.org, 2013).

Upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan yang ditetapkan secara regional, sektoral maupun subsektoral. Peraturan Menteri tersebut lebih jauh juga menetapkan upah minimum sektoral pada tingkat provinsi harus lebih tinggi sedikitnya lima persen dari standar upah minimum yang ditetapkan untuk tingkat provinsi. Demikian juga, upah minimum sektoral di tingkat kabupaten/kota harus lebih tinggi lima persen dari standar upah minimum kabupaten/kota tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkesimpulan bahwa upah minimum adalah upah yang diterima oleh para pekerja baik di instansi pemerintahan maupun di perusahaan swasta yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan mengenai standar jumlahnya. Upah minimum disetiap daerah berbeda-beda karena harga kebutuhan pokok disetiap daerah tidak sama.

Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam propinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL,

DPD mengusulkan Upah Minimum kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen KHL digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah) (id.wikipedia.org, 2013).

Melalui suatu kebijakan pengupahan, pemerintah Indonesia berusaha untuk menetapkan upah minimum yang sesuai dengan standar kelayakan hidup. Upah minimum yang ditetapkan pada masa lalu didasarkan pada KHM, dan selanjutnya didasarkan pada KHL. KHL ini adalah 20 persen lebih tinggi dalam hitungan rupiah jika dibandingkan dengan KHM. Peraturan ini ditetapkan pemerintah dalam perundangan terbaru yaitu UU No. 13/2003, yang menyatakan bahwa upah minimum harus didasarkan pada KHL.

Dalam perkembangannya pada masa sekarang, kelayakan suatu standar upah minimum didasarkan pada kebutuhan para pekerja sesuai dengan kriteria di bawah ini (id.wikipedia.org, 2013) :

1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
2. Index Harga Konsumen (IHK);
3. Kemampuan perusahaan, pertumbuhannya dan kelangsungannya;
4. Standar upah minimum di daerah sekitar;
5. Kondisi pasar kerja; dan
6. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Masalah dalam penetapan upah minimum adalah pada metode perhitungannya. Ada perbedaan nyata dari produktivitas antar sektor. Sektor-sektor yang menggunakan buruh terdidik umumnya telah membayar upah jauh di atas upah minimum karena hal ini mencerminkan produktivitas, tetapi banyak sektor lain yang produktivitasnya ada di bawah upah minimum sehingga

kebijakan upah minimum akan memukul sektor ini yang umumnya sektor padat karya (bappenas.go.id, 2010).

Menurut Sumarsono (2009, h. 12), sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu :

1. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya;
2. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang;
3. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas.

Selanjutnya Sumarsono (2009, h. 13) menyatakan beberapa ekonom melihat bahwa penetapan upah minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja. Kelompok ekonom lainnya dengan bukti empirik menunjukkan bahwa penerapan upah minimum tidak selalu identik dengan pengurangan kesempatan kerja, bahkan akan mampu mendorong proses pemulihan ekonomi.

Adam Smith dalam Pressman (2002, h. 10), melalui *The Wealth of Nations* menganalisis apa yang menyebabkan standar hidup meningkat dan menunjukkan bagaimana kepentingan diri dan persaingan berperan dalam pertumbuhan ekonomi (dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan). Pertumbuhan ekonomi bisa berjalan karena adanya proses mekanisasi dan pembagian kerja, selanjutnya pembagian kerja akan membuat produktivitas pekerja meningkat. Visi dari *The Wealth of Nations* adalah : ”--- dari kepentingan pribadi dan kepentingan nasional dalam harmoni yang sempurna akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang terus menerus”.

Menurut Bentham dalam Pressman (2002, h. 43), pemerintah memiliki tanggung jawab dan menjadi mekanisme untuk membantu meningkatkan

kesejahteraan warganya antara melalui berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Marshall dalam Pressman (2002, h. 45) juga melihat ekonomi dari pertimbangan moral untuk membantu yang miskin, selain pertimbangan pasar, karena itu ia secara khusus memperhatikan masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan melalui pasar tenaga kerja. Persediaan tenaga kerja yang tidak terlatih ditentukan oleh *prinsip populasi Malthusian*. Sebagai reaksi terhadap upah yang tinggi, populasi akan meningkat dan persediaan tenaga kerja juga akan meningkat.

2.2 Konsumsi

2.2.1. Pengertian Konsumsi dan Fungsi Konsumsi

Sukirno (2007, h. 12) mengungkapkan bahwa konsumsi merupakan perbelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk barang-barang akhir (*final goods*) dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut. Menurutnya, pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi.

Menurut BPS (2013), pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang tujuannya untuk konsumsi selama periode satu tahun, dikurangi dengan hasil penjualan netto dari barang-barang dan jasa. Barang-barang yang memiliki kegunaan ganda, yaitu selain untuk keperluan rumah tangga juga digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan usaha, pembelian dan biaya-biayanya harus dialokasikan secara proporsional terhadap masing-masing kegiatan yang dilakukan.

Sedangkan fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional.

2.2.2. Pola Konsumsi

Pola konsumsi didefinisikan sebagai jumlah pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pola konsumsi dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah ada dua keluarga yang menggunakan uang mereka dengan cara yang tepat sama. Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya. Untuk keperluan analisis, secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan dalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk pangan dan pengeluaran untuk non pangan (Samuelson, 2002, h. 23)

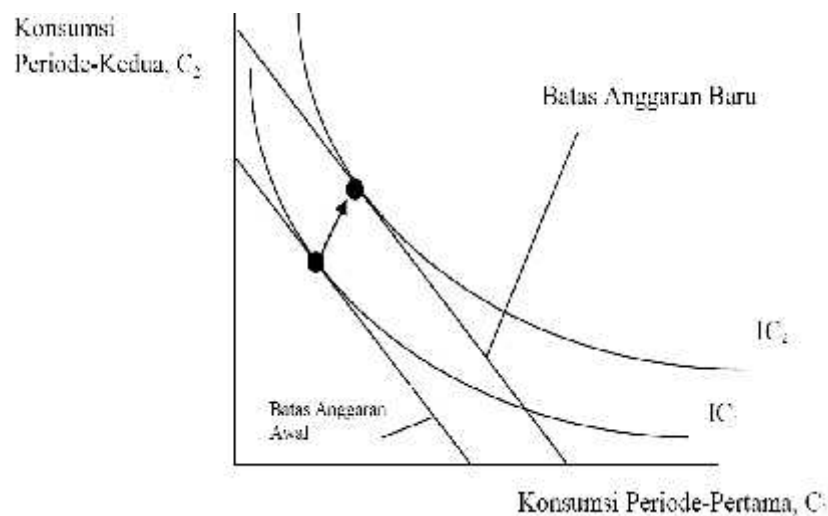
Lebih lanjut Samuelson (2002, h. 23) menyatakan bahwa pola konsumsi masyarakat menggambarkan alokasi dan komposisi atau bentuk konsumsi yang berlaku secara umum pada anggota masyarakat. Konsumsi bisa diartikan sebagai kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan atau keinginan saat ini guna meningkatkan kesejahteraannya. Dengan demikian, alokasi konsumsi sangat tergantung pada definisi dan persepsi masyarakat mengenai kebutuhan hidupnya.

Pengeluaran untuk pangan terdiri atas padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-mayur, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, minuman, bumbu, bahan pangan, makanan jadi, tembakau dan sirih. Sedangkan pengeluaran non pangan terdiri atas perumahan dan bahan bakar, aneka barang dan jasa (bahan perawatan badan, bacaan, komunikasi, kendaraan bermotor, transportasi, pembantu, dan sopir), biaya kesehatan, pakaian, alas kaki,

tutup kepala, barang tahan lama, pajak dan premi asuransi, keperluan pesta dan upacara (Samuelson, 2002, h. 24).

2.2.3. Pendapatan Mempengaruhi Konsumsi

Upah Minimum yang merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya merubah peran variabelnya sebagai pendapatan (*Income*). Peningkatan atau penurunan pendapatan yang diterima oleh konsumen akan menggeser garis batas anggaran ke atas maupun ke bawah sehingga konsumen akan memilih kombinasi terbaik dari konsumsi periode-pertama dan periode-kedua.



Gambar 2. Respon Konsumen terhadap Perubahan Pendapatan. Mankiw (2003, h.14)

Gambar 2 menunjukkan respon konsumen dalam menghadapi pergeseran garis batas anggaran dengan memilih lebih banyak konsumsi dalam kedua periode. Asumsi yang digunakan pada kurva tersebut adalah konsumen mengkonsumsi barang normal pada periode-pertama dan periode-kedua. Tanpa memperhatikan apakah kenaikan dalam pendapatan terjadi dalam periode-pertama

atau periode-kedua, konsumen menyebarkan kenaikan tersebut pada konsumsi dalam dua periode. Perilaku ini disebut *consumption smoothing*.

Konsumen dapat meminjam dan memberi pinjaman hari ini, penentuan waktu pendapatan adalah tidak relevan untuk berapa banyak yang dikonsumsi hari ini. Kesimpulan ini yang menyatakan bahwa konsumsi sekarang seseorang sangat bergantung pada pendapatan sekarangnya. Konsumsi didasarkan pada sumber daya yang konsumen harapkan selama hidupnya sehingga kemampuan untuk meminjam dapat membuat konsumsi sekarang dapat melebihi pendapatan sekarang (Mankiw, 2003, h. 14).

2.2.4. Teori Konsumsi John Maynard Keynes

Dalam teorinya Keynes mengandalkan analisis statistik, dan juga membuat dugaan-dugaan tentang konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi casual. Pertama, Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal (*marginal propensity to consume*) jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu. Kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah krusial bagi rekomendasi kebijakan untuk menurunkan pengangguran yang kian meluas. Kekuatan kebijakan fiskal, untuk mempengaruhi perekonomian seperti ditunjukkan oleh pengganda kebijakan fiskal muncul dari umpan balik antara pendapatan dan konsumsi. Kedua, Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*average propensity to consume*), turun ketika pendapatan naik. Ia percaya bahwa tabungan adalah kemewahan, sehingga ia berharap orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka ketimbang si miskin. Ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan

konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting. Keynes menyatakan pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori. Kesimpulannya pengaruh jangka pendek dari tingkat bunga terhadap pengeluaran individu dari pendapatannya bersifat sekunder dan relatif tidak penting (Raharja dan Manurung, 2004, h. 17).

Kecenderungan mengkonsumsi dapat dibedakan menjadi dua yaitu: kecenderungan mengkonsumsi marginal dan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata. Kecenderungan mengkonsumsi marginal didefinisikan sebagai perbandingan di antara penambahan konsumsi yang dilakukan dengan penambahan pendapatan, sedangkan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan disposibel pada ketika konsumen tersebut dilakukan (Raharja dan Manurung, 2004, h. 18).

Kecenderungan menabung dapat dibedakan menjadi dua yaitu kecenderungan menabung marginal dan kecenderungan menabung rata-rata. Kecenderungan menabung marginal adalah perbandingan di antara penambahan tabungan dengan penambahan pendapatan disposibel. Sedangkan kecenderungan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposibel (Raharja dan Manurung, 2004, h. 19).

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Masyarakat.

Mapandin (2005, h. 48) mengemukakan bahwa konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, fungsi sosial makanan pokok serta tradisi makanan pokok. Menurut Sayekti (2008, h. 7), perbedaan pendapatan akan mempengaruhi konsumsi dan

pola konsumsi rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan maka pola konsumsi baik pangan maupun non pangan akan semakin bervariasi.

Hal yang sama seperti yang dikemukakan oleh Suyastiri (2008, h. 17), konsumsi rumah tangga khususnya pangan dipengaruhi oleh pendapatan, harga bahan pangan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga di Indonesia adalah pendapatan dan tingkat suku bunga yang menyebabkan tingginya pembayaran bunga kredit. Dimana tingkat suku bunga tersebut yang nantinya akan semakin membebani pengeluaran suatu rumah tangga.

Pola konsumsi dan besarnya konsumsi rumah tangga menjadi proksi tercapainya kesejahteraan disuatu rumah tangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seperti pendapatan yang rendah, kesadaran akan pentingnya pendidikan yang masih rendah, tingginya jumlah tanggungan dalam suatu rumah tangga dan tingginya pembayaran bunga kredit diduga akan mempengaruhi besarnya konsumsi dan pola konsumsi didalam rumah tangga tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh upah minimum yang merupakan sumber pendapatan karyawan serta faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pola konsumsi karyawan yang bekerja pada sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

2.3.1. Hubungan Pendapatan dengan Konsumsi

Pendapatan merupakan variabel penting yang turut mempengaruhi besar konsumsi rumah tangga secara mikro maupun negara secara makro. Siregar (2009, h. 12) menegaskan bahwa faktor penting yang mempengaruhi perilaku

konsumsi adalah pendapatan dan budaya. Ia juga menambahkan bahwa dalam perekonomian nasional, konsumsi nasional dipengaruhi oleh pendapatan nasional dan suku bunga. Pendapatan mencerminkan kemampuan seseorang dalam melakukan konsumsi baik secara kualitas maupun kuantitas. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun non pangan semakin meningkat begitu pula sebaliknya.

2.3.2. Hubungan Jumlah Tanggungan dengan Konsumsi

Jumlah tanggungan dalam suatu rumah tangga akan mempengaruhi besar konsumsi yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga tersebut, terkait dengan kebutuhannya yang semakin banyak atau kurang. Mapandin (2005, h. 46) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa jumlah anggota keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi. Dalam penelitian tersebut ia menjelaskan keterkaitan sosial yang berkorelasi positif terhadap konsumsi rumah tangga.

2.3.3. Hubungan Pendidikan dengan Konsumsi

Pendidikan merupakan faktor penting bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan. Sumberdaya yang berkualitas ini dibutuhkan agar masyarakat pedesaan dapat mengakses pembangunan yang terkonsentrasi di perkotaan. Selain itu, dibutuhkan berbagai inovasi agar surplus tenaga kerja yang ada di sektor pertanian tidak harus mencari pekerjaan ke kota. Namun pada kenyataannya, masih banyak penduduk desa yang tidak menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang yang lebih tinggi. Kesulitan ekonomi menyebabkan penduduk usia sekolah lebih memilih untuk bekerja. Mahalnya pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi juga menjadi kendala bagi

masyarakat di pedesaan sehingga pos pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan juga semakin besar (Mapandin, 2005, h. 47).

2.3.4. Hubungan Penggunaan Kredit dengan Konsumsi

Penggunaan kredit untuk keperluan konsumsi tentu akan mengakibatkan semakin besarnya konsumsi yang dikeluarkan dalam suatu rumah tangga untuk membayar cicilan bunga. Biaya bunga yang harus ditanggung setiap bulannya akan mengakibatkan semakin besar pengeluaran rumah tangga. Menurut Sangadji (2007, h. 18), bunga merupakan imbalan bagi penabung karena menunda konsumsi atau dapat juga berarti sebagai imbalan yang dibayar peminjam atas daya beli saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tambahan pengeluaran apabila seseorang melakukan kredit atas barang atau jasa tertentu.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Konsumsi merupakan kegiatan belanja untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia beragam dan tidak ada batasnya. Setiap manusia pasti ingin mendapat kepuasan yang maksimum dalam melakukan konsumsi namun juga memiliki kendala yaitu pendapatan. Apabila pendapatan meningkat maka konsumsi juga akan meningkat. Kedua variabel baik konsumsi maupun pendapatan memiliki hubungan positif.

Upah minimum merupakan pendapatan dari hasil kerja seseorang atas aktivitas ekonomi tertentu. Pendapatan ini tidak hanya berhubungan dengan produktivitas dan jam kerja, namun juga kualitas yang dimiliki oleh tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja dapat diperoleh melalui berbagai pelatihan pendidikan baik formal maupun informal.

Semakin banyak jumlah anggota keluarga dalam suatu rumah tangga maka akan semakin banyak kebutuhan baik pangan maupun non pangan yang harus dipenuhi. Kondisi ini tentu akan menjadi beban apabila anggota keluarga tersebut belum mampu mencari nafkah untuk membiayai kebutuhannya sendiri sehingga besar pendapatan yang dikeluarkan untuk membiayai konsumsi akan meningkat.

Kebutuhan manusia yang tak terbatas tentu menjadi kendala apabila seseorang kurang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Pendapatan menjadi kendala bagi pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Ketika seseorang tidak berpendapatan sekalipun, manusia tetap harus memenuhi kebutuhan agar tetap bertahan hidup sehingga akses pinjaman menjadi solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

2.5 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan suatu hipotesis penelitian bahwa diduga upah berpengaruh secara nyata terhadap pola konsumsi karyawan pada sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan sampel

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 dan penelitian ini dilakukan pada 3 pabrik pengolahan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Nagan Raya yaitu pabrik yang dikelola oleh PT. Socfindo Kebun Seunagan, PT. Beurata Subur Persada dan PT. Fajar baizury & Brother.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja pada 3 pabrik pengolahan kelapa sawit hingga akhir tahun 2013 yaitu PT. Socfindo Kebun Seunagan sebanyak 165 orang, PT. Beurata Subur Persada sebanyak 88 orang dan PT. Fajar Baizury & Brothers sebanyak 373 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian diambil 10 persen dari karyawan pada masing-masing pabrik pengolahan kelapa sawit. Secara rinci populasi dan sampel karyawan pada masing-masing pabrik pengolahan kelapa sawit ditunjukkan pada tabel 3 berikut :

Tabel 3.
Populasi dan sampel karyawan pabrik pengolahan kelapa sawit

No	Nama Pabrik	Karyawan (Orang)	
		Populasi	Sampel
1	PT. Socfindo Kebun Seunagan	165	16,5
2	PT. Beurata Subur Persada	88	8,8
3	PT. Fajar Baizury & Brothers	373	37,3
Jumlah Total		626	62,6

Sumber : Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel 3 diperoleh bahwa jumlah seluruh karyawan yang terdapat pada 3 pabrik pengolahan kelapa sawit sebanyak 626 orang karyawan. Sedangkan sampel diambil 10 persen dari jumlah populasi karyawan pada masing-masing pabrik pengolahan kelapa sawit sehingga menghasilkan total jumlah sampel sebanyak 62,6 orang dan dibulatkan menjadi 63 orang karyawan.

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling* atau metode pemilihan acak sederhana. Dengan menggunakan metode ini penulis dapat memperoleh kriteria sampel yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan.

3.2. Data Penelitian.

3.2.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara pada responden. Sedangkan data sekunder yaitu bersumber dari dokumen data yang terdapat di Badan Pusat Statistik, Dinas atau Instansi terkait, literatur serta data-data lain yang dapat menunjang terselesaikannya penelitian ini.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu melalui studi pustaka dan penelitian lapangan.

- a. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan data dari berbagai literatur dan buku-buku referensi, jurnal, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden yang dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan penelitian serta dari dokumen data yang terdapat di BPS, Dinas atau Instansi terkait lainnya.

3.3. Model Analisis Data

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana yaitu analisis yang menjelaskan variabel bebas (X) dalam hal ini

adalah Upah yang berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) dalam hal ini adalah konsumsi Karyawan perkebunan kelapa sawit. Menurut Suharyadi (2004, h. 75), rumus regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$\text{Ln } Y = a + b X + e \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

Ln = Logaritma Natural

Y = Konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit

a = Intercept

b = Koefisien regresi

X = Upah

e = *Error term*

3.4. Definisi Operasional Variabel.

1. Upah (X).

Upah merupakan pendapatan dari hasil kerja seseorang atas aktivitas ekonomi tertentu yang diukur dalam Rupiah.

2. Konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit (Y).

Konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani. Pengeluaran ini dapat berupa makanan maupun non makanan yang diukur dalam Rupiah.

3.5. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian, maka hipotesisnya adalah apabila :

- a. $H_0 : \beta_1 = 0$, artinya Upah (X) tidak berpengaruh terhadap konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit (Y).

- b. $H_1: \rho > 0$, artinya Upah (X) berpengaruh terhadap konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit (Y).

Dengan derajat keyakinan tertentu maka :

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang nyata antara Upah terhadap konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang nyata antara Upah terhadap konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi lahan sawit begitu besar, perkebunan kelapa sawit Nagan Raya yang memproduksi aktif dan berkelanjutan seluas 64.387 hektare dengan produksi mencapai 24 ton/hektare yang dikelola perusahaan, dan 50 persen area itu dikelola masyarakat.

Bagian ini peneliti akan menjelaskan tentang analisis pengaruh Upah) terhadap pola konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2014 dengan mendatangi langsung karyawan perkebunan kelapa sawit dalam bentuk kuisioner di tiga perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya yaitu PT. Socfindo Kebun Seunagan, PT Beurata Subur Persada dan PT Fajar Baizuri & Broters.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dilapangan selanjutnya penulis menganalisis data yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengaruh Upah terhadap pola konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

4.1.1 Perkembangan Tingkat Upah Karyawan Perkebunan Kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

Fungsi upah minimum pada dasarnya sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau karyawan agar tidak dieksploitasi dalam bekerja sehingga penentuannya tetap melibatkan pemerintah. Dalam rangka mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan

peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya. Upah minimum merupakan upah terendah yang diterima karyawan/pekerja yang masa kerjanya dibawah satu tahun. Bagi yang bekerja lebih dari satu tahun, maka upah yang diterima diatur oleh peraturan perusahaan dengan sistem pengupahan yang telah disepakati antara pengusaha dan serikat pekerja perusahaan. Penetapan upah minimum kabupaten/kota harus tetap berdasarkan kesepakatan antara karyawan, pengusaha, dan pemerintah.

Upah merupakan salah satu rangsangan yang penting bagi karyawan dalam suatu perusahaan, Upah juga merupakan penghargaan atau balas jasa dari perusahaan atas tenaga karyawan yang dinyatakan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap minggu atau setiap bulan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berikut tabel tingkat upah karyawan perkebunan kelapa sawit Nagan Raya pada tahun 2014 :

Tabel 4
Tingkat Upah Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014

No	Nama Perkebunan	Jumlah karyawan (Orang)	Tingkat Upah (Rupiah)
1	PT. Beurata SP	9	1.750.000
2	PT. Socfindo Ks	17	1.750.000 - 2.750.000
3	PT. Fajar Baizuri & Brothers	37	1.750.000 – 3.000.000

Sumber : data primer (diolah tahun 2014)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat upah yang diberikan bervariasi pada PT. Beurata Subur Persada dengan jumlah karyawan 9 orang upah yang diterima Rp 1.750.000 Per orang. pada PT. Socfindo Kebun Seunagan dengan jumlah karyawan 17 orang upah yang diterima antara Rp 1.750.000 -

2.750.000. Sedangkan pada PT. PT. Fajar Baizuri & Brothers dengan jumlah karyawan 37 orang upah yang diterima antara Rp 1.750.000 - 3.000.000 rupiah. Tingkat upah yang diberikan oleh perusahaan tergantung dari lama bekerja karyawan diperusahaan tersebut. Semakin lama karyawan bekerja maka semakin meningkat pula upah yang di terima karyawan perkebunan sawit di Kabupaten Nagan Raya.

4.1.2 Tingkat Konsumsi Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya

Pola konsumsi merupakan alokasi bentuk konsumsi masyarakat atau karyawan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Konsumsi terbagi dua yaitu konsumsi pangan dan konsumsi non pangan, dan jumlah konsumsi seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor pendapatan, semakin besar pendapatan yang diterima maka akan semakin besar pula jumlah konsumsi yang dikeluarkan. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit di kabupaten nagan raya.

Tabel 5
Tingkat Konsumsi Karyawan Perkebunan Sawit di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014

No	Tingkat Konsumsi karyawan	Jumlah karyawan (Orang)
1	0 – 1.000.000	5
2	1.000.000 – 2.000.000	56
3	2.000.000 – 3.000.000	2
Total		63

Sumber : data primer (diolah tahun 2014)

Berdasarkan Tabel 5 diatas dari hasil penelitian menunjukkan dari 63 jumlah sampel karyawan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya,

tingkat konsumsi karyawan bervariasi dari Rp 0 – 1.000.000 terdapat 5 orang karyawan, tingkat konsumsi antara Rp 1.000.000 -2.000.000 terdapat 56 orang karyawan, sedangkan tingkat konsumsi antara Rp 2.000.000 -3.000.000 2 orang karyawan. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya paling banyak antara Rp 1.000.000 -2.000.000.

4.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Bagian ini penulis akan membahas tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh upah terhadap pola konsumsi karyawan perkebunan sawit di Kabupaten Nagan Raya yang akan dianalisis dengan menggunakan model analisis regresi linear sederhana yang akan diolah dengan menggunakan program *Statistik Product Service Solution (SPSS)* versi 20. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil regresi sebagai berikut :

Tabel 6
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
lnP.konsumsi	14.1631	.20857	63
lnUpah	14.5020	.16711	63

Sumber: Hasil Regresi (diolah tahun 2014)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pola Komsumsi (Y) dengan jumlah Sampel (n) sebanyak 63 orang karyawan mempunyai jumlah rata-rata adalah sebesar 144538.1 rupiah dengan Standar Deviasi adalah sebesar 0,20857 rupiah dan Upah(X) dengan jumlah Sampel (n) sebanyak 63 orang karyawan mempunyai rata-rata sebesar 2015873,02 rupiah dengan Standar Deviasi adalah sebesar 0,16711 rupiah.

4.2.1 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Variabel independen dilambangkan dengan X sedangkan variabel dependen dilambangkan dengan Y. Hasil Perhitungan regresi sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7
Hasil Estimasi Pengaruh Upah terhadap Pola Konsumsi Karyawan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.214	1.936		2.176	.033
lnUpah	.686	.133	.550	5.139	.000

Sumber: Hasil Regresi (diolah tahun 2014)

Setelah dilakukan Penelitian dengan hasil olahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program komputer (SPSS 20) maka dari tabel 8 diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\text{Ln Y} = \text{a} + \text{b Ln X} + \text{e}$$

$$\text{Ln Y} = 4,214 + 0,686 \text{ Ln X} \dots\dots\dots(2)$$

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konstanta

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka dapat diperoleh nilai konstanta sebesar 4,214, ini menyatakan apabila variabel X (Upah) sama dengan nol maka pola konsumsi karyawan perkebunan sawit sebesar 2,7182.

b. Koefisien Regresi X (Upah)

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka dapat diperoleh nilai Koefisien Regresi X (Upah) sebesar 0,686 hal ini menyatakan apabila Upah naik sebesar 1 rupiah maka akan menyebabkan penambahan pola konsumsi karyawan perkebunan sawit di Kabupaten Nagan Raya sebesar 0,686 persen.

4.2.2 Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi

Koefisien korelasi adalah suatu analisa untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan variabel lainnya, dan dinyatakan dalam lambang R . Koefisien korelasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara variabel Upah terhadap pola konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana untuk menentukan signifikan dari variabel Upah (X) terhadap Pola Konsumsi(Y), maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Koefisien Kolerasi dan Koefisien Determinasi

No	Variabel	Pola Konsumsi	Upah
1	Pearson correlation		
	a. LnPola Konsumsi	1.000	.550
	b. LnUpah	.550	1.000
2	Model		
	a. Koefisien Korelasi (R)	.550	
	b. Koefisien Determinasi(R^2)	.302	
	c. Koefisien Determinasi adjusted	.291	

Sumber: Hasil Regresi (diolah tahun 2014)

Berdasarkan tabel 8 maka dapat di jelaskan bahwa koefisien korelasi diperoleh $R = 0,550$ persen secara positif menjelaskan adanya hubungan antara Pola Konsumsi (Y) dengan Upah (X) dengan hubungan sebesar 55,0 persen.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel Upah (X) terhadap variabel Pola Konsumsi karyawan perkebunan sawit (Y) di Kabupaten Nagan Raya..

Adapun koefisien determinasi dapat diketahui dengan menggunakan rumus koefisien determinasi yaitu :

$$\text{Koefisien Determinasi} = r^2 \times 100 \%$$

$$\text{Koefisien Determinasi} = (0,550)^2 \times 100 \%$$

$$\text{Koefisien Determinasi} = 30,2 \%$$

Koefisien Determinasi (R^2) yaitu hasil dari perhitungan koefisien korelasi yang dikuadratkan maka didapatkan nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 30,2 persen hal ini menunjukkan bahwa variabel Upah berpengaruh secara signifikan terhadap Pola Konsumsi karyawan perkebunan sawit di Kabupaten Nagan Raya sedangkan sisanya 69,8 persen di pengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

4.2.3 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel upah (X), terhadap variabel Pola Konsumsi karyawan perkebunan sawit (Y) di Kabupaten Nagan Raya dilakukan pengujian individu dengan uji t pada jumlah pada taraf nyata () $=0,05$.

Tabel 9
Uji t

Model	Unstandardizer Coefficients		Standardized coefficients	T	Sig
	B	Std.Error	Beta		
(Constant)	4.214	1.936		2.176	.033
lnUpah	.686	.133	.550	5.139	.000

Sumber: Hasil Regresi (diolah tahun 2014)

Berdasarkan tabel 9 maka dapat dilihat pengaruh signifikan Variabel bebas terhadap Variabel terikat dapat dijelaskan bahwa variable Upah (X) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5.139 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1.980 artinya variabel Upah berpengaruh secara signifikan terhadap Pola Konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diketahui bahwa variabel upah berpengaruh secara signifikan terhadap Pola Konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil Pengujian dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Analisis pengaruh upah terhadap pola konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya. maka dapat di ambil simpulan :

- a. Jumlah konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya mempunyai jumlah rata-rata adalah sebesar 14,1631 rupiah. Sedangkan Jumlah upah karyawan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya mempunyai rata-rata sebesar 14,5020 rupiah.
- b. Koefisien korelasi $R = 0,550$ secara positif terhadap hubungan yang signifikan antara upah terhadap Pola Konsumsi dengan keeratan hubungan 55,0 persen sedangkan determinasi (R^2) menunjukkan bahwa upah memberikan sumbangan sebesar 30,2 persen terhadap Pola Konsumsi karyawan sedangkan 69,8 persen di pengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.
- c. Hasil yang di peroleh dari t_{hitung} sebesar 5,139 t_{tabel} sebesar 1,980 yang berarti H_0 ditolak H_1 diterima, maka secara parsial upah berpengaruh yang signifikan terhadap Pola Konsumsi karyawan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis akan mengajukan saran untuk untuk pihak-pihak yang terkait. sehingga dapat mencerminkan keadaan dalam membangun Provinsi Aceh yang lebih baik. Maka penulis akan mengajukan saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan kepada pemerintah Aceh khususnya Kabupaten Nagan Raya agar lebih memperhatikan dan mengontrol sistem pengupahan yang ada di Kabupaten Nagan Raya terutama di perusahaan perkebunan kelapa sawit, agar perusahaan betul-betul memperlakukan karyawannya dengan baik tidak mengeksploitasi karyawannya demi kepentingan perusahaan misalkan tidak memberikan upah yang layak bagi pekerja atau karyawannya.
- b. Diharapkan Kepada pemilik perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya agar dapat meningkatkan upah lebih tinggi lagi untuk kesejahteraan karyawan mengingat harga barang semakin meningkat dan upah karyawan hanya mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
- c. Diharapkan kepada para karyawan perkebunan kelapa sawit agar benar-benar mengalokasikan konsumsinya sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Diharapkan kepada para peneliti selanjutnya agar menggunakan metode lain dalam menganalisisnya, sehingga dapat membandingkan dengan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2012. *Konsumsi Penduduk Kabupaten Nagan Raya*. Nagan Raya: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Statistik Indonesia Tahun 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2014, *Keadaan Ketenagakerjaan Di Aceh*. Aceh : Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. 2007. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014. Buku II*. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. 2010. *Upah Minimum Regional dan Kesempatan Kerja. Mencari Jalan Tengah*. <http://els.bappenas.go.id>. Diakses tanggal 27 Juni 2013.
- Handewi P.S, Rahman dan Mega Ariani. (2004). *Distribusi Propinsi di Indonesia. Menurut Derajat ketahanan Pangan Rumah Tangga*. Bogor. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan pertanian.
- Mankiw, N G. 2003. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta, Salemba Empat
- Mapandin, WY. 2005. *Tesis: Hubungan Faktor Sosial Budaya dengan Konsumsi Makanan Pokok Rumah Tangga pada Masyarakat*. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2013, *Gambaran Umum Kabupaten Nagan Raya*, <http://www.naganrayakab.go.id/node/5> diakses tanggal 30 Agustus 2013.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja, No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang *Upah Minimum*, Jakarta.
- Peraturan Presiden, Nomor 15 tahun 2010 tentang *Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.
- Pressman, Steven. 2002. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala. 2004. *Pengantar Teori Ilmu Ekonomi – Mikroekonomi dan Makroekonomi*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus, 2002, *Makro Ekonomi*, Erlangga. Jakarta.

- Sangadji, M. 2007. *Fungsi Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura Ambon, Journal Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Sayekti, A. A. S. 2008. *Pola Konsumsi Rumah Tangga di Wilayah Historis Pangan Beras dan Non Beras di Indonesia*. Pusat Analisis Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Siregar, Khairani. 2009. *Analisis Determinasi Konsumsi Masyarakat di Indonesia*. Medan, Universitas Sumatera Utara.
- Sugiarto. 2008. *Metode Statistika*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suharyadi, Purwanto, 2004, *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Moderen*, Salemba Empat, Jakarta
- Sukirno, Sadono. 2008. *Mikroekonomi. Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Ekonomi Sumber Daya Manusia, Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suyastiri, N.M. 2008. *Diversifikasi Konsumsi Pangan Pokok Berbasis Potensi Lokal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pedesaan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Vol. 13 (1): 51-60*, Yogyakarta.
- Todaro, P. Michael. 2004. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta.
- Wikipedia, 2013. *Upah Minimum Regional* , <http://id.wikipedia.org/>. Diakses tanggal 25 Juni 2013.